

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis keuangan Asia/*Asian Financial Crisis* (AFC) di tahun 1997-1998 menjadi titik balik regionalisme Asia Timur sebagai respon terhadap ketergantungan global, terutama Amerika Serikat. Pertumbuhan regionalisme Asia Timur terjadi karena saling ketergantungan dan keterkaitan ekonomi. Maka dibentuklah kerja sama *Association of South-East Asian Nations (ASEAN) Plus Three (APT)* pada saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) informal ASEAN ke-2 di Malaysia pada Desember, 1997. KTT tersebut dihadiri oleh pemimpin negara-negara ASEAN, Cina, Jepang dan Republik Korea (ROK). AFC menjadi katalisator utama pembentukan ASEAN *Plus Three (APT)* karena setiap negara di kawasan ini terkena dampak negatif dari krisis dalam berbagai tingkatan (Hew, 2006).

Krisis keuangan Asia pada tahun 1997, telah membangkitkan kebutuhan mendesak akan kerja sama yang terlembaga dan integrasi ekonomi yang lebih kuat melampaui perbedaan geografis antara Asia Timur Laut dan Asia Tenggara (EASG, 2002). Selain itu, pembentukan kerja sama APT juga merupakan produk dari ketidakberhasilan ASEAN dan APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*).

Maka kerja sama APT dinilai lebih menarik sebagai mekanisme yang diperlukan untuk mengelola kekuatan dan pengaruh global, serta saling ketergantungan antara negara yang berkembang satu sama lain (Low, 2003). Kerja sama APT pembuka jalan untuk negara-negara ASEAN membangun hubungan ekonomi dengan negara maju, Jepang, Korea serta pasar Cina yang dinamis sebagai cara untuk mengatasi krisis (Stubbs, 2002). Jepang dan Cina, negara dengan ekonomi terbesar melakukan inisiatif melakukan kerja sama moneter dan keuangan melalui stabilitas mata uang dan pasar keuangan tanpa hubungan perdagangan.

Bentuk kerja sama APT tahap pertama adalah regionalisme moneter yang menargetkan tahapan keempat dan kelima pada konsep integrasi ekonomi Balassa (1961), yaitu dana likuiditas regional, sistem moneter regional, kesatuan ekonomi dan moneter, serta kesatuan politik (Dieter, 2005). Atas inisiatif itulah menjadi salah satu keberhasilan kerja sama APT yang menonjol dalam sejarah, yaitu dibentuknya *Chiang Mai Initiative* (CMI) dengan dua komponen utama, yaitu perluasan pengaturan *ASEAN Swap Arrangement* (ASA) dan jaringan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) di negara APT untuk mengatasi perihalan likuiditas keuangan agar terhindar dari krisis keuangan.

Kerja sama APT menjadi kendaraan terbaik untuk negara di Asia Tenggara dan Asia Timur dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi krisis. APT telah mengembangkan tiga jalur. Jalur pertama terdiri dari serangkaian perjanjian pertukaran mata uang bilateral. Jalur kedua adalah kesepakatan untuk bertukar informasi tentang pergerakan modal jangka pendek di Asia Timur. Jalur terakhir adalah pertukaran pandangan di antara anggota APT tentang reformasi yang

diperlukan untuk arsitektur keuangan internasional. Berbagai proyek telah dikembangkan di berbagai bidang melalui kerja sama APT. Kerja sama ASEAN dan APEC memiliki kedalaman organisasi yang lebih besar daripada APT, tetapi secara keseluruhan APT lebih efisien untuk memulai beberapa proyek praktis dan penting yang akan membantu memajukan kawasan ini dalam upaya kerja sama ekonomi.

Krisis keuangan Asia tahun 1997 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan aliran keuangan ke negara-negara Asia. ASEAN merupakan kawasan ekonomi terbesar ketiga di Asia dan kelima di dunia. Menjadi salah satu pasar negara berkembang yang paling besar secara global dan memiliki konsumsi yang cukup besar. Kondisi pasar yang besar dan integrasi regional yang kuat, negara-negara ASEAN yang tergolong negara berkembang tetap menjadi negara tujuan utama investasi asing langsung/*Foreign Direct Investment (FDI)*, setelah Cina.

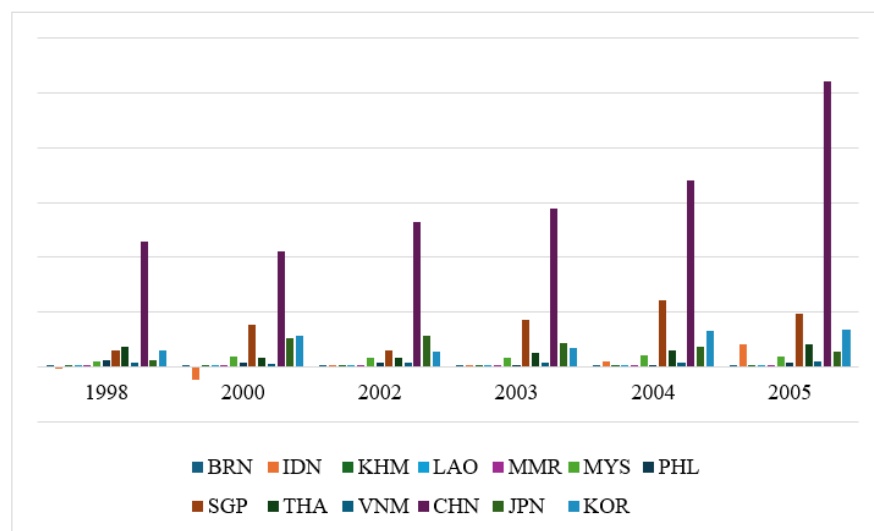
Negara-negara ASEAN sangat penting untuk Cina, Jepang dan Korea dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh permintaan domestik yang lemah dan kelebihan kapasitas dalam produksi. Selain itu, kawasan Asia Tenggara dijadikan sebagai koridor transit perdagangan yang menghubungkan negara-negara Barat dan negara *Plus Three*. Tren ini dapat dikaitkan dengan relokasi produksi dan pergeseran rantai pasokan ke Asia Tenggara. Namun, negara-negara anggota ASEAN sedang meningkatkan proteksionisme dan deglobalisasi akibat kondisi perdagangannya semakin terfokus pada Cina. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak investasi asing, mengembangkan industri domestik dan meningkatkan rantai nilai global (X. Li, 2024).

Negara-negara anggota ASEAN masih beradaptasi dengan pasar global dan mencari keseimbangan yang tepat antara proteksionisme dan liberalisasi. Maka untuk mengatasi hal tersebut perdagangan ASEAN tergantung pada tiga tran, yaitu meningkatkan ketergantungan pada Cina, proliferasi *Free Trade Area* (FTA) dan meningkatkan nasionalisme ekonomi dan proteksionisme. Meskipun ketidakpastian yang berlangsung dalam ekonomi global, ASEAN melaporkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor industri sedang berkembang cepat, integrasi regional semakin dalam, bertambahnya jumlah konsumen yang berpenghasilan menengah dan ada dorongan dari kebijakan yang konsisten dari pemerintah, sehingga para investor semakin sulit untuk mengabaikan pasar ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, 2023).

Kebangkitan didorong oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan investasi asing, pertumbuhan investasi dalam infrastruktur, termasuk ekonomi digital. Terbentuknya kerja sama APT menjadi kendaraan terbaik untuk negara di Asia Tenggara dan Asia Timur dalam mengembangkan strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi global, salah satunya dengan investasi asing langsung. Terjalannya kerja sama APT menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan mulai meningkat kembali aliran FDI setelah lima tahun setelah AFC pada tahun 2003. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap ketahanan dan daya tarik kawasan ASEAN bagi penanaman modal asing. Hal ini mencakup karena pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan, ASEAN yang lebih terhubung, pembagian kerja regional lebih regional dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional, lingkungan

investasi yang membaik secara signifikan, pertumbuhan sumber-sumber FDI baru dan peningkatan jumlah investor asing (ASEAN Secretariat, 2017).

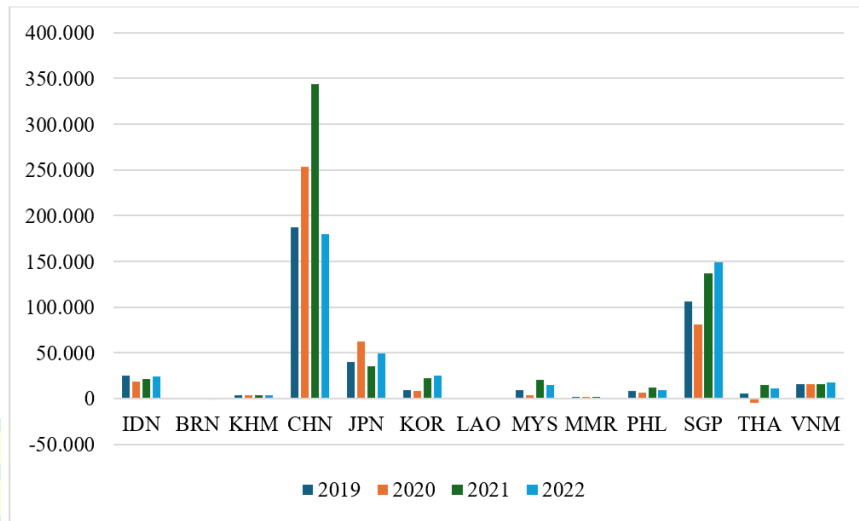
Grafik 1.1. menunjukkan dengan terbentuknya kerja sama APT mendorong pulihnya aliran FDI di negara-negara APT setelah lima tahun pada tahun 2003, setelah AFC.



Grafik 1.1. *Foreign Direct Investment (FDI) inflows, 1998-2005.*

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis.

FDI menjadi saluran penting arus masuk untuk memfasilitasi pemindahan teknologi antar negara, terlibat dalam mempromosikan perdagangan internasional melalui keterbukaan pasar luar negeri dan dapat menjadi sarana roda penggerak pembangunan ekonomi suatu negara melalui bantuan peningkatan sumber daya manusia. Meskipun ada tantangan akibat ketidakpastian dalam ekonomi global, aliran masuk FDI dari negara *plus three* ke negara anggota ASEAN mencapai US\$ 32 miliar di tahun 2019, dapat dilihat dari Grafik 1.2.



Grafik 1.2. *Foreign Direct Investment (FDI) inflows 2019-2022.*

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis.

Kerjasama APT merupakan pengelompokan negara-negara heterogen. Adanya perbedaan yang signifikan dalam hal sistem politik, ekonomi dan sosial. Namun, kawasan ini berkembang menjadi mekanisme yang sangat penting dalam memperkuat dan memperdalam kerjasama regional, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan politik (Teeramungcalanon, Chiu, & Kim, 2020). Secara umum diakui bahwa investasi penting bagi pertumbuhan dan bahwa tata kelola mempengaruhi investasi, tata kelola yang baik dikaitkan dengan investasi yang lebih tinggi, baik FDI maupun swasta domestik. Faktor ekonomi dan non-ekonomi menjadi faktor pendorong arus masuk FDI di suatu negara.

Faktor penentu non-ekonomi dari penanaman modal asing dapat dipertimbangkan berdasarkan indikator tata kelola, yaitu kualitas peraturan, stabilitas politik, supremasi hukum, suara dan akuntabilitas, efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi. Ada kesepakatan luas bahwa ciri-ciri tata kelola tertentu yang sering dikaitkan dengan lembaga demokratis, seperti transparansi dan

supermasi hukum yang efektif, membantu memikat perusahaan asing untuk berinvestasi dengan mengurangi ketidakpastian dalam kebijakan dan risiko politik lainnya, seperti pengambilalihan ilegal (Staats, 2012). Ketika pemerintah bersaing untuk menarik FDI, pemerintah berusaha menawarkan penawaran terbaik yang mampu diberikan kepada calon investor asing, termasuk tidak hanya berbagai insentif, namun juga serangkaian kebijakan horizontal yang bertujuan untuk meningkatkan praktik pemerintah, seperti meningkatkan transparansi, memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan efisiensi pemberian layanan publik (Q. Li, 2006).

Pencapaian dalam tata kelola pemerintah yang baik bervariasi dari satu negara ke negara lainnya (Kaufmann *et al.*, 2004). Laju perbaikannya penting bagi pengusaha bisnis internasional karena kemungkinan besar akan menarik tanggapan positif dalam bentuk penanaman modal asing. Negara-negara Asia mengalami aliran masuk modal asing yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran perekonomiannya (Athukorala & Rajapatirana, 2003). Menurut Globerman (2002) berpendapat bahwa FDI dan investasi domestik didorong secara langsung oleh tata kelola pemerintah yang baik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membantu negara-negara berkembang dan pemerintahannya mencapai nilai-nilai demokrasi, kebebasan mendasar, pemilihan umum yang bebas dan adil, mengurangi kekerasan, kemiskinan dan korupsi melalui kesetaraan, partisipasi, transparansi, supremasi hukum, akuntabilitas dan pluralisme.

Dana Moneter Internasional/*International Monetary Fund* (IMF) berkonsentrasi pada indikator *good governance* yang terkait erat dengan

pengawasan dan pengamatan IMF terhadap kebijakan ekonomi mikro. Oleh karena itu, IMF menyatakan bahwa transparansi akun yang disiapkan oleh pemerintah, pengelolaan dana, pengelolaan sumber daya publik yang efektif dan pembentukan lingkungan yang transparan dan stabil untuk kegiatan sektor swasta sangat penting untuk pembangunan di semua tahap.

Bank dunia mengidentifikasi elemen inti dari tata kelola sebagai pengelolaan sektor publik, akuntabilitas, kerangka hukum untuk pembangunan, transparansi dan informasi, yang berfokus pada aspek ekonomi (Moldanado,2010).

World Governance Indicators (WGI) menggunakan enam dimensi tata kelola yang diidentifikasi oleh Kaufmann, yaitu Suara dan Akuntabilitas/*Voice and Accountability* (VA), Stabilitas Politik/*Political Stability and Absence of Violence/Terrorism* (PS), Efektivitas Pemerintah/*Government Effectiveness* (GE), Kualitas Regulasi/*Regulatory Quality* (RQ), Supremasi Hukum/*Rule of Law* (RL) dan Kontrol Korupsi/*Control of Corruption* (CC) (Kaufmann *et al.*, 2004).

Tabel 1.1. Indikator *Good Governance* ASEAN+3, 2018 – 2022.

Negara	VA	PS	GE	RQ	RL	CC
ASEAN						
Brunei Darussalam	-0,88	1,19	1,34	0,85	0,78	1,03
Kamboja	-1,31	-0,07	-0,50	-0,64	-0,97	-1,28
Indonesia	0,14	-0,50	0,28	0,14	0,14	-0,42
Laos	-1,74	0,63	-0,70	-0,86	-0,84	-1,04
Malaysia	-0,09	0,14	1,00	0,63	0,54	0,23
Myanmar	-1,23	-1,68	-1,28	-0,90	-1,26	-0,83
Filipina	-0,06	-0,90	0,06	0,07	-0,59	-0,55
Singapura	-0,14	1,46	2,23	2,18	1,82	2,12
Thailand	-0,82	-0,56	0,21	0,05	0,07	-0,47
Vietnam	-1,37	-0,02	0,13	-0,36	-0,12	-0,41
Negara Plus Three						
Cina	-1,60	-0,40	0,60	-0,30	-0,12	-0,12
Jepang	1,00	1,03	1,54	1,36	1,51	1,47
Korea Selatan	0,84	0,60	1,31	1,08	1,15	0,69

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan adanya kesenjangan kualitas *good governance* pada negara-negara APT mengingat kawasan ini penting dalam memperkuat dan memperdalam kerja sama regional, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan politik. FDI akan menurun akibat dari tata kelola yang buruk dalam tiga hal (Dixit, 2012). Pertama FDI berkenaan dengan hak milik dan kontrak atas persediaan modal. Kedua, FDI sering kali melibatkan satu transaksi besar antara perusahaan dan negara. Terakhir, perusahaan asing mempunyai alasan untuk lebih khawatir mengenai perlindungan hak milik dan kontrak mereka oleh pemerintah dan aturan hukum negara tuan rumah dibandingkan dengan investor dalam negeri.

Sejak akhir tahun 1990-an, studi tentang keterkaitan antara tata kelola yang baik dan arus masuk FDI telah mendapatkan perhatian dari berbagai pakar karena

beberapa alasan, yaitu FDI sensitif terhadap risiko politik spesifik negara, yang berarti bahwa negara yang memiliki dasar hukum yang paten dan peraturan yang hati-hati serta kelembagaan yang efisien untuk melindungi hak milik dan hak sipil investor dapat menarik FDI dengan lebih baik. Kedua, FDI bersifat elastis terhadap biaya transaksi investasi yang menyiratkan modal asing cenderung mengalir di negara di mana investor mendapat keuntungan finansial dan kemudahan melakukan bisnis dipandang sebagai mengurangi biaya investasi. Terakhir, FDI dipengaruhi oleh kepercayaan dan keyakinan para investor yang pada dasarnya mengacu pada persepsi investor terhadap kebijakan fiskal dan moneter pemerintah serta stabilitas makroekonomi suatu negara (Mengistu & Adhikary, 2011).

Tingginya arus perdagangan dan mobilitas modal di kawasan ini dalam periode globalisasi menjadi risiko untuk investor asing, jika kualitas dan struktur kelembagaan negara APT lemah (Angkinand Prabha & Chiu, 2012). Negara dengan lingkungan bebas risiko dan institusi berkualitas baik akan menarik investor asing untuk terlibat transaksi lintas batas (North, 1990). Transparansi pemerintah melalui tata kelola yang baik, seperti efektivitas, aturan hukum, kurangnya korupsi, suara dan partisipasi, dapat mendorong terjadinya pertumbuhan, termasuk investasi asing (North *et al.*, 2008). Negara dengan sistem hukum yang memberikan kepastian mengenai perlindungan kegiatan operasi akan menarik FDI (White III, 2015).

Zidi (2016) telah mempelajari tata kelola dan investasi asing langsung yang menyatakan bahwa tata kelola berdampak positif pada aliran masuk FDI di negara-negara MENA. Selain itu, Hussain & Malik (2011) menyatakan bahwa indikator tata kelola meningkatkan aliran masuk FDI di negara-negara berkembang.

Stabilitas politik, situasi hukum dan ketertiban, tenaga sumber daya mineral dan kebijakan ekonomi pemerintah membantu menarik investasi asing. Faktor kelembagaan mempengaruhi positif dan berbedanya arus masuk FDI, sedangkan krisis keuangan berdampak negatif terhadap arus masuk FDI di negara berkembang (Kurul & Yasemin Yalta, 2017).

Investasi asing langsung bergantung pada kebijakan pemerintah, infrastruktur yang mendukung dan tata kelola yang transparan di negara tuan rumah (Dunning, 2013). Selain itu, korupsi berdampak signifikan terhadap FDI, demokrasi, stabilitas pemerintah, hukum dan ketertiban, kebebasan sipil dan hak-hak politik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap aliran masuk FDI (Hussain & Malik, 2011). Peningkatan aliran modal asing dapat ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah yang dapat memberikan insentif seperti penurunan tarif dan kelonggaran pajak kepada investor. Perusahaan multinasional selalu berusaha melakukan investasi di mana lingkungan kelembagaan menguntungkan. Sementara itu, negara dengan kerangka kelembagaan transparan dan bercirikan politik yang koheren akan menjadi pilihan utama investor (Buchanan, Le, & Rishi, 2012).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa FDI diperkirakan akan sangat terkait dengan tata kelola pemerintah yang baik di negara tuan rumah. Maka penelitian ini terkait dengan mengeksplorasi pengaruh kualitas pemerintah terhadap investasi asing langsung di ASEAN+3. Studi ini penting karena akan menambah wawasan bagi pembuat kebijakan di kawasan APT mengenai komponen-komponen tata kelola yang perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak investasi asing.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penelitian maka dirumuskan berbagai pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh kualitas pemerintah terhadap investasi asing langsung di ASEAN+3?
- 2) Indikator apa yang memiliki pengaruh signifikan dari kualitas pemerintah dalam menarik investasi asing langsung di ASEAN+3?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar (valid, sah, substantial) dan dapat dipercaya, andal (padat).

- 1) Mengidentifikasi pengaruh kualitas pemerintah terhadap investasi asing langsung di ASEAN+3.
- 2) Menganalisis indikator dari kualitas pemerintah yang signifikan menarik investasi asing langsung di ASEAN+3.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat diandalkan untuk membantu berbagai pihak, antara lain.

- 1) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur akademik dalam kajian yang berhubungan mengenai hubungan antara kualitas pemerintah dan investasi asing langsung.

2) Manfaat Fungsional/Praktis

Penelitian ini akan menambah referensi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, meningkatkan konektivitas negara-negara di kawasan ASEAN+3, dan menarik lebih banyak lagi investasi asing langsung.

